

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*. (Bandung: Alumni, 1983)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan IX, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)
- Agus Yudha Hernoko, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. MandarMaju, 2008)
- Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- _____, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013)
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2004)
- G.HAL.S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Jakarta Erlangga, 1991)
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004)
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- _____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009)
- _____, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)

- _____, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013)
- HAL.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991)
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008)
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006)
- Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Berkontrak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010)
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011)
- Ian Mcleod, *Legal Theory*, (University of Stirling: Palgrave Macmillan Law Masters, Stirling Law School, 2012)
- Ira Koesoemawati dan Yurisman Rijan, *Ke - Notaris, Raih Asa Sukses*, (Jakarta: RAS, 2018)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 2005)
- Luhut MP Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi oleh Advokat)*. (Jakarta: Djambatan, 2008)
- M. Syamsudin, *Operasionilisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989)
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. II.* (Jakarta: Bina Aksara. 1984)
- Mohal. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Alumni. HAL. 1984)

- _____, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Notodisuryo, S. R, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- R. Tresna, *Komentari HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet- ke 5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Salim HAL.S, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setiawan, *Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, (Jakarta: Varia Peradilan Edisi 48, 1989)
- Shanti Bhushan Mishra, *Handbook Of Research Methodology A Compendium For Scholars & Researchers*, (New Delhi: Educreation Publishing, 2011)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013)
- Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, (Jakarta: Liberty, 2000)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)

Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenangan, dan Sifat Akta)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016)

Van Hammel Dalam Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)

Victor. M. Situmorang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta 1993)

JURNAL ILMIAH

Agust Toni Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Otentik”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 3, 2018

Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”. *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015

Dwi Pusparini, & Gede Made Swardhana, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 1, 2021

Hindra, “Penerapan Asas Praduga Sah Terhadap Akta Notaris Dengan Adanya Figur Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/PDT/2017/PT. BNA)”. *Indonesian Notary*, Vol. 1, No. 4., 2020

I Ketut Tjukup, *et.al.* “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2018

Jamin Ginting dan Patrick Talbot, “1 Fundraising Aspect of International Terrorism Organization in ASEAN: Legal and Political Aspects”. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2023

Kunni Afifah, “Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya”. *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, 2017

Paramaningrat Manuaba, *et.al.* “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik”. *Acta Comitatus: Jurnal Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1 April 2018

Rana Dewanty Jusuf, Kurnia Sukmasari, “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Terbukti Membuat Akta Secara Berpihak”. UPH Notary Journal, Vol. 3, No. 1, 2023

Vitto Odie Prananda, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)”. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 2, No. 1, 2018

Yoel Charlye Karinda, “Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Kasus Putusan MPPN Nomor 02/B/MPPN/X/2018)”. UPH Notary Journal, Vol. 3, No. 1 April 2023

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 25 April 2019

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT DPS tanggal 27 Juni 2019

HASIL PENELITIAN

Irene Dwi Enggarwati, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik”, Tesis, Malang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia)